REVISI IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS SKPD

Nama Pemerintah Daerah : **Kabupaten Kutai Kartanegara**

Nama SKPD : **Kecamatan Muara Jawa**

Tahun Penilaian : **2026**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	I/C/C (uncontrol/Control)	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kegiatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)	Respon Risiko (Diterima, mitigasi,dihindari dan ditransfer)	Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Mitigation)				Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
													Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			Kemungkinan (Likehood)	Dampak (Impact)	Level Risiko	Kategori/ peringkat risiko			
1	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	Indeks pelayanan publik kecamatan	3,73	78.570.771.940,00	RS MJ 01	Rendahnya indeks pelayanan publik Kecamatan	1. Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik; 2. Kurangnya kompetensi petugas pelayanan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam memberikan pelayanan publik; 3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung dalam pelayanan publik (jaringan internet yang kurang stabil/sering mengalami gangguan, minimnya pemeliharaan IT karena keterbatasan anggaran); 4. Kurang optimalnya Respon dan penanganan terhadap pengaduan dari masyarakat.	Eksternal dan Internal	Uncontrol/ Control	Menurunnya Indeks pelayanan publik kecamatan	CAMAT	Rendahnya indeks pelayanan publik Kecamatan disebabkan oleh 1. Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik; 2. Kurangnya kompetensi petugas pelayanan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam memberikan pelayanan publik; 3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung dalam pelayanan publik (jaringan internet yang kurang stabil/sering mengalami gangguan, minimnya pemeliharaan IT karena keterbatasan anggaran); 4. Kurang optimalnya Respon dan penanganan terhadap pengaduan dari masyarakat.	3	3	9	Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. SOP Penanganan Pengaduan melalui aplikasi SP4N Lapor.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Mengadakan pelatihan teknis kepada petugas pelayanan; 3. Pemeliharaan dan menjaga kebersihan ruang pelayanan; 4. Pemeliharaan jaringan internet; 5. Menerapkan sistem antrean elektronik atau digital untuk mengatur alur pengunjung secara tertib dan adil; 6. Penanganan pengaduan masyarakat sesuai SOP SP4N Lapor.	Januari - Desember	Sekcam	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Mengadakan pelatihan teknis kepada petugas pelayanan; 3. Pemeliharaan dan menjaga kebersihan ruang pelayanan; 4. Pemeliharaan jaringan internet; 5. Menerapkan sistem antrean elektronik atau digital untuk mengatur alur pengunjung secara tertib dan adil; 6. Penanganan pengaduan masyarakat sesuai SOP SP4N Lapor.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT
2	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100		RS MJ 02	Target persentase kepatuhan terhadap SOP PATEN tidak tercapai	1. SOP yang ada terlalu rumit, tidak realistis, atau tidak mutakhir; 2. Minimnya sosialisasi tentang SOP dan perubahannya terhadap petugas pelayanan; 3. Infrastruktur pendukung yang kurang optimal (jaringan internet tidak stabil, server aplikasi PATEN error, pemadaman listrik, peralatan (komputer dan printer) yang sudah rusak/usak; 4. Minimnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan terhadap proses dan hasil pelayanan.	Eksternal dan Internal	Uncontrol/ Control	Penilaian kepatuhan internal menurun dan indeks pelayanan publik terpengaruh negatif	CAMAT	Target persentase kepatuhan terhadap SOP PATEN tidak tercapai disebabkan oleh 1. SOP yang ada terlalu rumit, tidak realistis, atau tidak mutakhir; 2. Minimnya sosialisasi tentang SOP dan perubahannya terhadap petugas pelayanan; 3. Infrastruktur pendukung yang kurang optimal (jaringan internet tidak stabil, server aplikasi PATEN error, pemadaman listrik, peralatan (komputer dan printer) yang sudah rusak/usak; 4. Minimnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan terhadap proses dan hasil pelayanan.	3	3	9	Tinggi	1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. SK Camat Muara Jawa Nomor P-20/SET.UKK-M.JAWA/000.8.3.2.09/2025 tentang Standar Pelayanan Kecamatan Muara Jawa; 3. SOP PATEN; 4. Maklumat Pelayanan Kecamatan Muara Jawa Nomor 582/YANMUM/000.8.3.2.4/2024; 5. Informasi tentang jam pelayanan Kecamatan Muara Jawa (display elektronik dan sosial media); 6. Ketersediaan kotak saran dan aplikasi SP4N LAPOR; 7. Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	1. Melakukan review total terhadap SOP yang ada (penyederhanaan SOP bila terlalu rumit penyederhanaan alur kerja tanpa mengurangi aspek legalitas); 2. Mengadakan pelatihan reguler kepada petugas pelayanan tentang pemahaman atas SOP dan penerapannya dalam pemberian pelayanan; 3. Membuat infografis alur layanan yang ringkas, jelas, dan dipasang di area loket pelayanan serta diumumkan di media sosial resmi milik pemerintah Kecamatan, baik untuk petugas maupun masyarakat; 4. Melakukan monitoring berkala terhadap proses dan hasil pelayanan.	Januari - Desember	Sekcam	1. Melakukan review total terhadap SOP yang ada (penyederhanaan SOP bila terlalu rumit penyederhanaan alur kerja tanpa mengurangi aspek legalitas); 2. Mengadakan pelatihan reguler kepada petugas pelayanan tentang pemahaman atas SOP dan penerapannya dalam pemberian pelayanan; 3. Membuat infografis alur layanan yang ringkas, jelas, dan dipasang di area loket pelayanan serta diumumkan di media sosial resmi milik pemerintah Kecamatan, baik untuk petugas maupun masyarakat; 4. Melakukan monitoring berkala terhadap proses dan hasil pelayanan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT
3		Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	75,63		RS MJ 03	Target atas Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan tidak tercapai	1. Keterbatasan SDM yang kompeten; 2. Keterbatasan sumberdaya sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kinerja; 3. SOP dan alur kerja yang berbelit; 4. Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan terkait Akuntabilitas Kinerja yang rendah; 5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pimpinan atas kinerja Kelurahan	Eksternal dan Internal	Uncontrol/ Control	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja kelurahan dan menurunnya nilai kinerja kelurahan secara administratif	CAMAT	Target atas Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan tidak tercapai disebabkan oleh 1. Keterbatasan SDM yang kompeten; 2. Keterbatasan sumberdaya sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kinerja; 3. SOP dan alur kerja yang berbelit; 4. Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan terkait Akuntabilitas Kinerja yang rendah; 5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pimpinan atas kinerja Kelurahan	3	3	9	Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 3. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; 4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kelurahan (1. Laporan Realisasi fisik dan keuangan; 2. Laporan Persediaan (Stock opname); 3. Laporan e-pantau) tepat waktu; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan; 4. Inovasi Pembangunan Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah; 5. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan; 6. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (program penghijauan atau kebersihan); 7. Ketepatan waktu dalam menginput Laporan Prodeskel dan Elleskel.	Januari s/d Desember	Sekcam	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kelurahan (1. Laporan Realisasi fisik dan keuangan; 2. Laporan Persediaan (Stock opname); 3. Laporan e-pantau) tepat waktu; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan; 4. Inovasi Pembangunan Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah; 5. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan; 6. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (program penghijauan atau kebersihan); 7. Ketepatan waktu dalam menginput Laporan Prodeskel dan Elleskel.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT

PEMANTAUAN RTP

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksankaan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Mengadakan pelatihan teknis kepada petugas pelayanan; 3. Pemeliharaan dan menjaga kebersihan ruang pelayanan; 4. Pemeliharaan jaringan internet; 5. Menerapkan sistem antrean elektronik atau digital untuk mengatur alur pengunjung secara tertib dan adil; 6. Penanganan pengaduan masyarakat sesuai SOP SP4N Lapor.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT
1. Melakukan review total terhadap SOP yang ada (penyederhanaan SOP bila terlalu rumit penyederhanaan alur kerja tanpa mengurangi aspek legalitas); 2. Mengadakan pelatihan reguler kepada petugas pelayanan tentang pemahaman atas SOP dan penerapannya dalam pemberian pelayanan; 3. Membuat infografis alur layanan yang ringkas, jelas, dan dipasang di area loket pelayanan serta diumumkan di media sosial resmi milik pemerintah Kecamatan, baik untuk petugas maupun masyarakat; 4. Melakukan monitoring berkala terhadap proses dan hasil pelayanan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT
1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kelurahan (1. Laporan Realisasi fisik dan keuangan; 2. Laporan Persediaan (Stock opname); 3. Laporan e-pantau) tepat waktu; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan; 4. Inovasi Pembangunan Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah; 5. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan; 6. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (program penghijauan atau kebersihan); 7. Ketepatan waktu dalam menginput Laporan Prodeskel dan Elleskel.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	CAMAT

MUARA JAWA, 9 MARET 2026
CAMAT

MUHAMMAD RAMLI,SE,MM
PEMBINA, IV/a
NIP. 197506042000121003

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : **Kutai Kartanegara**
Nama SKPD : **Kecamatan Muara Jawa**
Tahun Penilaian : **2026**
Tujuan Renstra : **Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan**
Sasaran Strategis Renstra : **Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan**
Indikator Kinerja Utama : **Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP**
: **Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan**

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

No.	Nama Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan/ Uraian Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan SOP)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)	Respon Risiko (Diterima, mitigasi,dihindari dan ditransfer)	Status Risiko setelah ada Penanganan				Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengedalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
													Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ peringkat risiko		Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			Kemungkinan (Likehood)	Dampak (Impact)	Level Risiko	Kategori/ peringkat risiko					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	31.585.886.440	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	36.984.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	38.295.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	34.500.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	40.270.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN TELUK DALAM)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	37.400.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN DONDANG)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	39.540.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

												ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN																	PEMANTAUAN RTP														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN TAMA POLE)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	41.400.000	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	35.278.500	RP MJ 01	Data kinerja tidak akurat/valid	SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	Internal	Control	Nilai SAKIP rendah	Camat	Data kinerja tidak akurat/valid disebabkan SDM tidak disiplin melaporkan, sistem aplikasi lambat/rusak, dan kurangnya validasi data di tingkat pelaksana.	3	3	9	Sedang	Surat Edaran Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	Januari s/d Desember	Sekcam	Menginventarisir dan Mengarsipkan Seluruh Laporan Yang Sudah Kedalam Database Arsip OPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	1.844.650.000	RP MJ 02	Pelayanan perizinan tidak selesai tepat waktu sesuai SOP	Ketidakstabilan jaringan sistem online, keterlambatan verifikasi/persetujuan dari dinas teknis terkait, dan dokumen pemohon tidak lengkap/salah input.	Internal dan Eksternal	Control	Target IKU tidak tercapai dan timbulnya pengaduan/ ketidakpuasan masyarakat.	Camat	Pelayanan perizinan tidak selesai tepat waktu sesuai SOP disebabkan Ketidakstabilan jaringan sistem online, keterlambatan verifikasi/persetujuan dari dinas teknis terkait, dan dokumen pemohon tidak lengkap/salah input.	3	3	9	Sedang	SOP Pelayanan	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Setiap Bulan	Januari s/d Desember	Sekcam	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai	17.520.000.000	RP MJ 03	Tumpang tindih/ ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induk dengan Kecamatan.	- Perbup yang belum rinci/spesifik. - Kurangnya koordinasi antar OPD terkait. - Perubahan regulasi di tingkat pusat/provinsi.	Eksternal	Control	- Konflik kewenangan di lapangan. - Proses perizinan/pelayanan menjadi lambat. - Indikator kinerja tidak tercapai.	Camat	Tumpang tindih/ ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induk dengan Kecamatan. disebabkan - Perbup yang belum rinci/spesifik. - Kurangnya koordinasi antar OPD terkait. - Perubahan regulasi di tingkat pusat/provinsi.	3	3	9	Sedang	Forum koordinasi yang dilaksanakan OPD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait pelimpahan kewenangan	Januari s/d Desember	Sekcam	Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait pelimpahan kewenangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN MUARA JAWA)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	18.376.568.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN TELUK DALAM)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN DONDANG)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN TAMA POLE)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	200.000.000	RP MJ 04	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD	Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	Eksternal	Uncontrol	Ketidakmampuan mengelola dan kualitas program kerja rendah, dukungan masyarakat terhadap program rendah, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai	Camat	SDM pengurus LPMD yang belum optimal dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan dan program kerja LPMD disebabkan Proses rekrutmen pengurus tidak mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, minimnya pelatihan peningkatan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran LPMD	2	4	8	Sedang	SOP dan Sosialisasi Regulasi terkait LPMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Kecil	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekcam	Monitoring pelaksanaan kegiatan LPMD ke desa-desa dan penyampaian laporan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 Persen	95.000.000	RP MJ 05	Frekuensi pelanggaran Perda meningkat dan tumpang tindih wewenang serta keterlambatan respons dalam penanganan insiden.	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda) dan hukum yang berlaku dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polisi, TNI, Satpol PP, dll) yang belum optimal dalam penanganan terpadu.	Internal dan Eksternal	Uncontrol	Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Terganggu	Camat	Frekuensi pelanggaran Perda meningkat dan tumpang tindih wewenang serta keterlambatan respons dalam penanganan insiden. disebabkan oleh Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda) dan hukum yang berlaku dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polisi, TNI, Satpol PP, dll) yang belum optimal dalam penanganan terpadu.	4	3	12	Sedang Tinggi	Rapat-rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Kecil	Melakukan Monitoring dan Patroli Bulanan Secara Bersama Antara TNI Polri Dan Petugas Linmas Kecamatan	Januari s/d Desember	Sekcam	Melakukan Kegiatan secara Terpadu dengan Polsek, Koramil, UPT Dinas/Badan, dan Tokoh agama/masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.165.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN TELUK DALAM)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN DONDANG)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN TAMA POLE)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	RP MJ 06	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target	Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	Internal	Control	Kinerja OPD rendah/tidak akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan tidak efektif, dan tidak terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik	Camat	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum tidak mencapai target disebabkan oleh Kurangnya dukungan/partisipasi perangkat daerah lain dalam koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi.	2	5	10	Sedang	Rapat koordinasi rutin.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	1	2	Kecil	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	Januari s/d Desember	Sekcam	Mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan (pelatihan-pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekcam	Camat
			JUMLAH	**78.570.771.940**																																							

MUARA JAWA, 18 DESEMBER 2025
CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MUARA JAWA

MUHAMMAD RAMLI,SE,MM
PEMBINA, IV/a
NIP. 197506042000121003

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

No.	Nama Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan/Uraian Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	U/C/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan SOP)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)	Respon Risiko (Diterima/mitigasi,dihindari dan ditransfer)	Status Risiko setelah ada Penanganan *(Risk After Mitigation)*			Kategori/ peringkat risiko	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
													Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			Kemungkinan (Likehood)	Dampak (Impact)	Level Risiko						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**60.253.000**	**RK MJ 01**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tersedia**	**Bahan penyusunan dokumen tidak lengkap dari unit kerja dan kurangnya koordinasi antar bidang**	**Internal**	**Control**	**Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan daerah**	**Sekretaris Camat**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tersedia disebabkan oleh Bahan penyusunan dokumen tidak lengkap dari unit kerja dan kurangnya koordinasi antar bidang**	**3**	**4**	**12**	**Sedang Tinggi**	**Surat edaran batas waktu penyampaian data dan Rapat koordinasi internal rutin.**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**Melakukan sosialisasi jadwal dan batas waktu pengumpulan data secara tegas dan Memanfaatkan sistem informasi perencanaan**	**Januari s.d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan sosialisasi jadwal dan batas waktu pengumpulan data secara tegas dan Memanfaatkan sistem informasi perencanaan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Muara Jawa)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	RSK MJ 01	Dokumen perencanaan yang disusun tidak konsisten/selaras dengan RPJMD/RKPD	Kurang cermat dalam penuangan/input data perencanaan, dan Perbedaan interpretasi/pemahaman indikator kinerja antara OPD dan Bappeda.	Internal	Control	Target kinerja OPD tidak tercapai, Dokumen perencanaan tidak relevan dan harus direvisi.	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Dokumen perencanaan yang disusun tidak konsisten/selaras dengan RPJMD/RKPD disebabkan oleh Kurang cermat dalam penuangan/input data perencanaan, dan Perbedaan interpretasi/pemahaman indikator kinerja antara OPD dan Bappeda.	3	4	12	Sedang Tinggi	Aplikasi ERPJMD-NG dan SIPD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	3	6	Rendah Sedang	Review berjenjang oleh atasan langsung, dan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) terkait penyusunan dokumen perencanaan secara berkala.	April s.d Oktober	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Review berjenjang oleh atasan langsung, dan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) terkait penyusunan dokumen perencanaan secara berkala.				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	CAMAT
1.2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	40.253.000	RSK MJ 02	Data sektoral yang dipublikasikan tidak akurat atau tidak mutakhir.	Kurangnya pemahaman SDM pengelola data tentang prinsip SDI, tidak ada mekanisme validasi data yang terpisah. dan keterlambatan upadate data atau input data dari unit kerja dan desa.	Internal	Control	Penyusunan Laporan tidak akuntabel, pengambilan keputusan yang salah, ketidakpercayaan publik terhadap data pemerintah, dan kegagalan pencapaian target program.	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Data sektoral yang dipublikasikan tidak akurat atau tidak mutakhir. disebabkan oleh Kurangnya pemahaman SDM pengelola data tentang prinsip SDI, tidak ada mekanisme validasi data yang terpisah. dan keterlambatan upadate data atau input data dari unit kerja dan desa.	4	4	16	Tinggi	Aplikasi Satu Data dan BECIK	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	Melakukan update data secara berkala	Januari s.d Desember	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Melakukan update data secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	CAMAT
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**14 Laporan**	**28.170.600.046**	**RK MJ 02**	**Laporan keuangan tidak akuntabel**	**1. Input data tidak tervalidasi dengan baik.. 2. Kurangnya rekonsiliasi data secara berkala. 3. SDM pengelola keuangan kurang kompeten.**	**Internal**	**Control**	**1. Temuan audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat. 2. Pengambilan keputusan yang salah. 3. Sanksi administrasi.**	**Sekretaris Camat**	**Laporan keuangan tidak akuntabel disebabkan oleh 1. Input data tidak tervalidasi dengan baik.. 2. Kurangnya rekonsiliasi data secara berkala. 3. SDM pengelola keuangan kurang kompeten.**	**2**	**4**	**8**	**Rendah Sedang**	**1. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 2. SE PPKD Nomor P-1552/BPKAD/BAP/900/7/2025 tentang Dokumen Pertanggungjawaban Yang Bersumber dari APBD.**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**2**	**3**	**6**	**Rendah Sedang**	**Pengawasan pengelolaan keuangan secara internal (penerapan SPIP) dan eksternal (Review APIP, BPK)**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Pengawasan pengelolaan keuangan secara internal (penerapan SPIP) dan eksternal (Review APIP, BPK)**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2112 Orang / Bulan	16.171.082.953	RSK MJ 03	Keterlambatan pembayaran gaji dan TPP ASN	1. Perubahan data kepegawaian (mutasi, pensiun, dsb) yang terlambat diinformasikan/diperbarui. 2. Keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. 3. Gangguan teknis pada aplikasi gaji dan SIPD.	Internal dan Eksternal	Control dan Uncontrol	Menurunnya kinerja ASN dan timbulnya protes/ keluhan dari pegawai.	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Keterlambatan pembayaran gaji dan TPP ASN disebabkan oleh 1. Perubahan data kepegawaian (mutasi, pensiun, dsb) yang terlambat diinformasikan/ diperbarui. 2. Keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. 3. Gangguan teknis pada aplikasi gaji dan SIPD.	3	3	9	Sedang Tinggi	APlikasi SIM Gaji dan SIPD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	3	6	Rendah Sedang	1. Monitoring Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Perubahan Data Pegawai di Bagian Umum secara berkala; 2. Rekonsiliasi dengan BPKAD Bidang Anggaran untuk memperhitungkan ketersediaan dan/atau kekurangan anggaran	Januari s/d Desember	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	1. Monitoring Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Perubahan Data Pegawai di Bagian Umum secara berkala; 2. Rekonsiliasi dengan BPKAD Bidang Anggaran untuk memperhitungkan ketersediaan dan/atau kekurangan anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	CAMAT
2.2	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	185 Dokumen	11.857.997.093	RSK MJ 04	Penyelesaian pembayaran utang kepada pihak ketiga TA 2025 tidak sesuai jadwal/terlambat	Berkas pencairan terlambat	Internal	Control	Ketidakpuasan pihak ketiga	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (SuryaniS.IP)	Penyelesaian pembayaran utang kepada pihak ketiga TA 2025 tidak sesuai jadwal/terlambat disebabkan oleh Berkas pencairan terlambat	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Jadwal penyusunan dan asistensi RKA/DPA dan BPKAD; 2. Jadwal pengajuan berkas pencairan dari BPKAD; 3. Penunjukan PPTK subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 4. Ketersediaan dokumen-dokumen kontrak dan syarat pencairan anggaran.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	3	6	Rendah Sedang	- Penerapan jadwal dan tenggat waktu yang ketat untuk setiap tahapan. - Peningkatan koordinasi antara PPTK dengan Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Maret	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (SuryaniS.IP)	- Penerapan jadwal dan tenggat waktu yang ketat untuk setiap tahapan. - Peningkatan koordinasi antara PPTK dengan Bagian Penyusunan Program dan Keuangan				√										1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (SuryaniS.IP)	CAMAT
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	RSK MJ 05	Keterlambatan penyelesaian laporan akhir tahun	1. Keterlambatan input data dari unit kerja lain. 2. Proses review dan koreksi yang memakan waktu lama. 3. SDM yang kurang kompeten atau terbatas	Internal	Control	Penurunan penilaian kinerja OPD, sanksi administratif dana UP ditahan dan pemotongan TPP	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Keterlambatan penyelesaian laporan akhir tahun disebabkan oleh 1. Keterlambatan input data dari unit kerja lain. 2. Proses review dan koreksi yang memakan waktu lama. 3. SDM yang kurang kompeten atau terbatas	3	3	9	Sedang Tinggi	Aplikasi SIPD dan surat edaran penyusunan laporan akhir tahun dari Sekretaris Daerah	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	3	6	Rendah Sedang	- Penerapan jadwal dan tenggat waktu yang ketat untuk setiap tahapan. - Sosialisasi standar pelaporan dan pelatihan bagi staf terkait. - Peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait.	Januari dan Desember	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	- Penerapan jadwal dan tenggat waktu yang ketat untuk setiap tahapan. - Sosialisasi standar pelaporan dan pelatihan bagi staf terkait. - Peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	CAMAT
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	131.520.000	RSK MJ 06	Keterlambatan pembayaran honorarium bulanan pengelola keuangan	1. Keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. 2. Gangguan teknis pada aplikasi gaji dan SIPD.	Internal	Control	Menurunnya kinerja Pengelola Keuangan	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Keterlambatan pembayaran honorarium bulanan pengelola keuangan disebabkan oleh 1. Keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. 2. Gangguan teknis pada aplikasi gaji dan SIPD.	3	3	9	Sedang Tinggi	Aplikasi SIPD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	3	6	Rendah Sedang	Membuat daftar penjagaan pembayaran honorarium rutin kantor yang akan dibayarkan setiap bulan	Januari s/d Desember	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	Membuat daftar penjagaan pembayaran honorarium rutin kantor yang akan dibayarkan setiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. PPTK (Ifni Hanifah Gani)	CAMAT
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan**	**3226 Unit**	**37.400.000**	**RK MJ 03**	**Laporan penatausahaan BMD tidak lengkap**	**Pengelolaan administrasi/pengarsipan yang buruk dan Kurangnya koordinasi internal.**	**Internal**	**Control**	**Proses Rekonsiliasi aset daerah terhambat**	**Sekretaris Camat**	**Laporan penatausahaan BMD tidak lengkap disebabkan Pengelolaan administrasi/pengarsipan yang buruk dan Kurangnya koordinasi internal.**	**3**	**4**	**12**	**Sedang Tinggi**	**Aplikasi Simda BMD**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**2**	**2**	**4**	**Rendah**	**Melakukan rekonsiliasi rutin per triwulan**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan rekonsiliasi rutin per triwulan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	RSK MJ 07	Tidak Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Tidak tersedianya Dokumen Pengadaan BMD/ Asal Usul BMD	Internal	C	Legalitas BMD tidak pasti dan rawan diakui pihak lain	Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian	Tidak Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah disebabkan oleh Tidak tersedianya Dokumen Pengadaan BMD/ Asal Usul BMD	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014: (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan BMD; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Aplikasi SIMDA BMD	Memadai	Efektif	Ada	mitigasi	2	2	4	Rendah	Membuat daftar penjagaan pengadaan BMD sesuai dengan DPA yang ada dan segera melakukan pencatatan BMD setelah ada realisasi belanja	Januari s/d Desember	Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian	Membuat daftar penjagaan pengadaan BMD sesuai dengan DPA yang ada dan segera melakukan pencatatan BMD setelah ada realisasi belanja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian,PPTK	CAMAT
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Muara Jawa)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.400.000	RSK MJ 08	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai	Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserah terimakan	Internal	C	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah tidak akuntabel	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai disebabkan oleh Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserah terimakan	3	3	9	Sedang Tinggi	SOP Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Aplikasi Simda BMD, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Belum Memadai	Tidak Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	Membuat daftar penjagaan pembayaran honorarium rutin kantor yang akan dibayarkan setiap bulan	Januari s/d Desember	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Membuat daftar penjagaan pembayaran honorarium rutin kantor yang akan dibayarkan setiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**9 Layanan**	**593.026.500**	**RK MJ 04**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak terlaksana secara maksimal**	**Kurangnya Sumber Daya Pendukung (SDM, Sarana dan prasarana pendukung) Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Internal**	**C**	**Menurunnya IKM, keluhan masyarakat, citra negatif Perangkat Daerah**	**Sekretaris Camat**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak terlaksana secara maksimal disebabkan oleh Kurangnya Sumber Daya Pendukung (SDM, Sarana dan prasarana pendukung) Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3**	**4**	**12**	**Sedang Tinggi**	**1. DPA Pengadaan BMD; 2. RKBMD/RKPBMD.**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**Evaluasi Sumber Daya Manusia sebelum penetapan PPTK dan penyusunan jadwal pengadaan barang/jasa**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Evaluasi Sumber Daya Manusia sebelum penetapan PPTK dan penyusunan jadwal pengadaan barang/jasa**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	CAMAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.150.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	RSK MJ 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	RSK MJ 10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Lurah; 3. PPTK Kecamatan dan Kelurahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Lurah; 3. PPTK Kecamatan dan Kelurahan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Lurah; 3. PPTK Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	125.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian / PPTK Kecamatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian / PPTK Kecamatan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian / PPTK Kecamatan	CAMAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.492.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.000.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.900.000	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.201.500	RSK MJ 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.569.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	CAMAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.644.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.295.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.958.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.077.000	RSK MJ 12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Angagran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	PPTK Kelurahan	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Laporan	79.240.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 3. PPTK Kecamatan	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Camat kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Camat dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas; 3. Instruksi Camat kepada Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan untuk menghitung kekurangan anggaran dan mengajukan Permohonan penambahan anggaran perjalanan dinas di APBD-P 2026	Januari - Desember	1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 3. PPTK Kecamatan	1. Instruksi Camat kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Camat dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas; 3. Instruksi Camat kepada Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan untuk menghitung kekurangan anggaran dan mengajukan Permohonan penambahan anggaran perjalanan dinas di APBD-P 2026	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 3. PPTK Kecamatan	CAMAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	8.000.000	RSK MJ 13	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran	1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	Lurah	1. Kebutuhan akan biaya perjalanan dinas tidak terpenuhi; 2. Biaya perjalanan dinas mengalami keterlambatan pembayaran disebabkan oleh 1. Keterbatasan anggaran; 2. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian perjalanan dinas ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan koordinasi/rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan secara daring/online; 2. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD dan PERBUP Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	Januari - Desember	PPTK Kelurahan	1. Instruksi Lurah kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas; 2. Disposisi Lurah dalam setiap undangan/dokumen terkait kebutuhan/rencana pelaksanaan perjalanan dinas;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120.000.000	RSK MJ 14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum perkantoran	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	√	√	√										1. Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. PPTK Kecamatan	CAMAT
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**1 Unit**	**97.648.000**	**RK MJ 05**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tidak sesuai kebutuhan**	**1. Proses pengadaan barang/jasa terlambat; 2. Kekurangan anggaran**	**Internal/Eksternal**	**C**	**Sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan administrasi kantor tidak maksimal**	**Sekretaris Camat**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tidak sesuai kebutuhan disebabkan oleh 1. Proses pengadaan barang/jasa terlambat; 2. Kekurangan anggaran**	**3**	**4**	**12**	**Sedang Tinggi**	**1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKBMD; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigsi**	**2**	**2**	**4**	Rendah	**Evaluasi Sumber Daya Manusia sebelum penetapan PPTK dan penyusunan jadwal pengadaan barang/jasa**	Januari-Maret	**Sekretaris Camat**	**Evaluasi Sumber Daya Manusia sebelum penetapan PPTK dan penyusunan jadwal pengadaan barang/jasa**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	97.648.000	RSK MJ 15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak sesuai kebutuhan	1. Proses pengadaan barang/jasa terlambat; 2. Ketersediaan anggaran sewa kendaraan tidak mencukupi jangka waktu 12 bulan.	Internal/Eksternal	C	Mobilitas untuk kegiatan kantor menggunakan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak maksimal	Ifni Hnaifah Gani,S.Sos	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak sesuai kebutuhan disebabkan oleh 1. Proses pengadaan barang/jasa terlambat; 2. Ketersediaan anggaran sewa kendaraan tidak mencukupi jangka waktu 12 bulan.	3	4	12	Sedang Tinggi	1. DPA Pengadaan BMD; 2. RKBMD; 3. Standard harga satuan biaya sewa kendaraan	Memadai	Efektif	Tidak	Mitigsi	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa; 2. Instruksi Camat kepada Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan untuk menghitung kekurangan anggaran dan mengajukan Permohonan penambahan anggaran perjalanan dinas di APBD-P 2026	Januari-Maret, Agustus-September	Ifni Hnaifah Gani,S.Sos	1. Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa; 2. Instruksi Camat kepada Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan untuk menghitung kekurangan anggaran dan mengajukan Permohonan penambahan anggaran perjalanan dinas di APBD-P 2026	√	√	√					√	√				Ifni Hnaifah Gani,S.Sos	CAMAT
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**2.260.176.394**	**RK MJ 06**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak optimal**	**1. Kekurangan anggaran; 2. Kenaikan standard harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Internal/Eksternal**	**UC**	**Menurunnya IKM, keluhan masyarakat, citra negatif Perangkat Daerah**	**Sekretaris Camat**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak optimal disebabkan oleh 1. Kekurangan anggaran; 2. Kenaikan standard harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**4**	**4**	**16**	**Tinggi**	**1. DPA; 2. Anggaran kas; 3. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigsi**	**4**	**3**	**12**	**Sedang Tinggi**	**Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.462.920.394	RSK MJ 16	Alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1. Kenaikan tarif dasar listrik, internet, dan air; 2. Peningkatan volume penggunaan listrik, internet, dan air.	Internal/Eksternal	UC	Adanya Pemutusan jaringan listrik, internet, dan air bersih dari Pihak Penyedia (PLN, Telkom, PDAM)	Hatmah,S.IP	Alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disebabkan oleh 1. Kenaikan tarif dasar listrik, internet, dan air; 2. Peningkatan volume penggunaan listrik, internet, dan air.	4	4	16	Tinggi	1. DPA Kegiatan; 2. Anggaran kas; 3. Invoice/tagihan dari pihak penyedia (PLN,Telkom,PDAM)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Pengendalian penggunaan sumberdaya air,listrik,dan internet di kantor; 2. Rekonsiliasi dengan BPKAD Bidang Anggaran untuk memperhitungkan ketersediaan anggaran dan pengajuan permohonan penambahan anggaran bila terjadi kekurangan anggaran di APBD-Perubahan	Januari s/d Desember	Hatmah,S.IP	1. Pengendalian penggunaan sumberdaya air,listrik,dan internet di kantor; 2. Rekonsiliasi dengan BPKAD Bidang Anggaran untuk memperhitungkan ketersediaan anggaran dan pengajuan permohonan penambahan anggaran bila terjadi kekurangan anggaran di APBD-Perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Hatmah,S.IP	CAMAT
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	797.256.000	RSK MJ 17	Keterlambatan dan kesalahan dalam pembayaran honorarium tenaga kebersihan dan penjaga malam	1. Keterlambatan penyampaian Nilai honor yang akan dibayarkan; 2. Belum tersedianya SPD	Internal	C	1. Keterlambatan pembayaran gaji Non ASN; 2. Realisasi belanja tidak efisien.	Hatmah,S.IP	Keterlambatan dan kesalahan dalam pembayaran honorarium tenaga kebersihan dan penjaga malam disebabkan oleh 1. Keterlambatan penyampaian Nilai honor yang akan dibayarkan; 2. Belum tersedianya SPD	3	3	9	Sedang Tinggi	1. DPA Kegiatan; 2. Anggaran kas; 3. SOP Pembayaran honor; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	Monitoring pembayaran honor petugas kebersihan dan penjaga malam	Januari s/d Desember	Hatmah,S.IP	Monitoring pembayaran honor petugas kebersihan dan penjaga malam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Hatmah,S.IP	CAMAT

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

Nama Pemerintah Daerah	: Kutai Kartanegara
Nama SKPD	: Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian	: 2026
Tujuan Renstra	: Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra	: Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
	: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**541 Unit**	**670.450.000**	**RK MJ 07**	**Aset BMD Tidak Terpelihara**	**Lemahnya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar kontrol atas Aset Yang Dipelihara**	**Internal**	**C**	**Terjadi potensi rusak serta kehilangan atas BMD**	**Sekretaris Camat**	**Aset BMD Tidak Terpelihara disebabkan oleh Lemahnya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar kontrol atas Aset Yang Dipelihara**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD;**	**memadai**	**Efektif**	**Tidak**	**Mitigsi**	**2**	**2**	**4**	**Rendah**	**Membuat Lembar Control Penjagaan Pemeliharaan BMD**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Membuat Lembar Control Penjagaan Pemeliharaan BMD**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	RSK MJ 18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Ifni Hnaifah Gani	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Januari s/d Desember	Ifni Hnaifah Gani	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ifni Hnaifah Gani	CAMAT
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	225.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Ifni Hnaifah Gani	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	Ifni Hnaifah Gani	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ifni Hnaifah Gani	CAMAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	8.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	8.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	RSK MJ 19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	65.000.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	1. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Pengurus Barang Kecamatan; 3. PPTK Kecamatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	1. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Pengurus Barang Kecamatan; 3. PPTK Kecamatan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian; 2. Pengurus Barang Kecamatan; 3. PPTK Kecamatan	CAMAT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	7.190.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	4.000.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	6.500.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	6.820.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	8.400.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	8.540.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit	8.000.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 Unit	5.000.000	RSK MJ 20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak efektif dan terkontrol	Lurah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember	PPTK Kelurahan	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	RSK MJ 21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	Internal	C	Pemeliharaan gedung kantor tidak efektif dan terkontrol	Kasubag UKK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan belum menyusun jadwal dan kebutuhan pemeliharaan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. SOP Pengelolaan aset; 3. RKPBMD; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan gedung	Januari s/d Desember	Kasubag UKK	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan gedung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag UKK	CAMAT
8	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif**	**2 Kegiatan**	**325.000.000**	**RK MJ 08**	**Tidak terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait**	**External dan Internal**	**C**	**Menurunnya IKM, keluhan masyarakat, citra negatif Perangkat Daerah**	**Sekretaris Camat**	**Tidak terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan disebabkan oleh Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA**	**Memadai**	**Efaktif**	**Ada**	**Mitigsi**	**3**	**2**	**6**	**Rendah Sedang**	**Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
8.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	50.000.000	RSK MJ 22	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa tidak optimal	Minimnya Kapasitas SDM dalam Kolaborasi Lintas Instansi, Aparatur belum dibekali dengan kemampuan fasilitasi, negosiasi, dan koordinasi multisektor.	External	C	Tumpang tindih pelaksanaan, serta inefisiensi penggunaan sumber daya	Kasi PMD	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa tidak optimal disebabkan oleh Minimnya Kapasitas SDM dalam Kolaborasi Lintas Instansi, Aparatur belum dibekali dengan kemampuan fasilitasi, negosiasi, dan koordinasi multisektor.	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA; 3. SK TPPS Kecamatan; 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 adalah landasan hukum untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.	Memadai	Efaktif	Tidak	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Januari s/d Desember	Kasi PMD	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD	CAMAT
			1 Laporan	25.000.000	RSK MJ 23	Partisipasi Kecamatan Muara Jawa dalam kegiatan Erau tidak maksimal	Keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana untuk mendukung kegiatan.	Internal	C	Partisipasi dalam kegiatan Erau tidak optimal	Kasi Trantib	Partisipasi Kecamatan Muara Jawa dalam kegiatan Erau tidak maksimal disebabkan oleh Keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana untuk mendukung kegiatan.	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA; 3. Surat Edaran tentang jadwal pelaksanaan Erau	Memadai	Efaktif	Tidak	Mitigsi	2	2	4	Rendah	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Januari s/d Desember	Kasi Trantib	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT
8.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	RSK MJ 24	Fasilitasi pelaksanaan HUT RI tidak maksimal	Kurangnya koordinasi antara Panitia HUT RI Kecamatan dan semua instansi vertikal di Kecamatan	Internal	C	Potensi konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kegiatan pemerintahan	Kasi Trantib	Fasilitasi pelaksanaan HUT RI tidak maksimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi antara Panitia HUT RI Kecamatan dan semua instansi vertikal di Kecamatan	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA; 3. SK Panitia HUT RI Tahun 2026	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	2	2	4	Rendah	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Januari s/d Desember	Kasi Trantib	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**2 Laporan**	**50.000.000**	**RK MJ 09**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah tidak optimal**	**Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait**	**External dan Internal**	**C**	**Menurunnya IKM, keluhan masyarakat, citra negatif Perangkat Daerah**	**Sekretaris Camat**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah tidak optimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA**	**Memadai**	**Efaktif**	**Ada**	**Mitigsi**	**3**	**2**	**6**	**Rendah Sedang**	**Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja**	**Januari s/d Desember**	**Camat**	**Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja**			√			√	√	√	√	√			**Camat**	**CAMAT**
9.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	RSK MJ 25	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal Posyandu) tidak optimal	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu Kecamatan	External dan Internal	C	Persepsi negatif atas layanan di tingkat kecamatan memengaruhi reputasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.	Kasi PMD	Fasilitas Tim Posyandu Kecamatan (Pokjanal Posyandu) tidak optimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu Kecamatan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA; 3. SK Pokjanal Posyandu	Memadai	Efaktif	Tidak	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Januari s/d Desember	Kasi PMD	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD	CAMAT
			1 Laporan	25.000.000	RSK MJ 26	Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan tidak optimal	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pengurus Kwaran Pramuka Kecamatan	External dan Internal	C	Persepsi negatif atas layanan di tingkat kecamatan memengaruhi reputasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.	Kasi Trantib	Fasilitasi Kwaran Pramuka Kecamatan tidak optimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pengurus Kwaran Pramuka Kecamatan	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. DPA; 3. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efaktif	Tidak	Mitigsi	3	2	6	Rendah Sedang	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Januari s/d Desember	Kasi Trantib	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT
10	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**18.989.650.000**	**RK MJ 10**	**Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik**	**Tidak Ada Sosialisasi tentang Kegiatan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Camat**	**Eksternal dan Intrnal**	**C/UC**	**Menurunnya IKM, keluhan masyarakat, citra negatif Perangkat Daerah**	**Sekretaris Camat**	**Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik disebabkan oleh Tidak Ada Sosialisasi tentang Kegiatan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Camat**	**4**	**4**	**16**	**Tinggi**	**1. SK Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigsi**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
10.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	800.000.000	RSK MJ 27	Belum maksimalnya Pengelolaan Sampah Kecamatan	SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah kurang	Internal/Eksternal	C/UC	Volume sampah meningkat	Kasi Pelayanan Umum	Belum maksimalnya Pengelolaan Sampah Kecamatan disebabkan oleh SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah kurang	4	3	12	Sedang Tinggi	1. DPA; 2. Jadwal dan alur pengangkutan sampah; 3. RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	2	6	Rendah Sedang	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	Januari s/d Desember	Kasi Pelayanan Umum	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Umum	CAMAT
			1 Laporan	449.650.000	RSK MJ 28	Belum optimalnya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah anggaran belum mencukupi untuk pemeliharaan seluruh PJU di jalan protokol Kecamatan dan pemukiman di 8 Kelurahan	Internal/Eksternal	C/UC	LPJU tidak dapat dipelihara dan direhabilitasi secara optimal	Suryani,S.IP	Belum optimalnya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum disebabkan oleh Jumlah anggaran belum mencukupi untuk pemeliharaan seluruh PJU di jalan protokol Kecamatan dan pemukiman di 8 Kelurahan	4	3	12	Sedang Tinggi	1. DPA; 2. RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	2	6	Rendah Sedang	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	Januari s/d Desember	Suryani,S.IP	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Suryani,S.IP	CAMAT
			1 Laporan	70.000.000	RSK MJ 29	Fasilitasi PATEN tidak optimal	Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung	Internal	Control	Hasil Survey Kepuasan Masyarakt menurun karena kualitas pelayanan PATEN tidak optimal	Kasi Pelayanan Umum	Fasilitasi PATEN tidak optimal disebabkan oleh Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 penyelenggaraan Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. SOP PATEN; 3. Maklumat Pelayanan; 4. DPA;	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	2	6	Rendah Sedang	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	Januari s/d Desember	Kasi Pelayanan Umum	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Umum	CAMAT
			1 Laporan	150.000.000	RSK MJ 30	Tidak optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana	1. Kejadian dan Jumlah korban bencana yang tidak dapat diprediksi; 2. Keterbatasan anggaran	Eksternal	UC	Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan waktu	Kasi Trantib	Tidak optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana disebabkan oleh 1. Kejadian dan Jumlah korban bencana yang tidak dapat diprediksi; 2. Keterbatasan anggaran	4	3	12	Sedang Tinggi	1. SOP Penanganan darurat bencana; 2. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	2	6	Rendah Sedang	1. Validasi data korban bencana agar penyaluran bantuan tepat sasaran; 2. Kerjasama dengan masyarakat dan CSR dalam pemberian bantuan bagi korban bencana	Januari s/d Desember	Kasi Trantib	1. Validasi data korban bencana agar penyaluran bantuan tepat sasaran; 2. Kerjasama dengan masyarakat dan CSR dalam pemberian bantuan bagi korban bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

10.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	17.520.000.000	RSK MJ 31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal & Eksternal	Control	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Kasi PMD dan PPTK (Suryani,S.IP)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPkom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada Ppkom dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kecamatan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Desember	Kasi PMD dan PPTK (Suryani,S.IP)	1. Surat Instruksi Camat kepada Ppkom dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kecamatan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD dan PPTK (Suryani,S.IP)	CAMAT
11	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**1.670.000.000**	**RK MJ 11**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tidak maksimal**	**Kurangnya kualitas SDM dan ketersediaan sarana prasarana pendukung palaksanaan kegiatan**	**Internal dan Eksternal**	**UC**	**Rendahnya Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan**	**Sekretaris Camat**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tidak maksimal disebabkan oleh Kurangnya kualitas SDM dan ketersediaan sarana prasarana pendukung palaksanaan kegiatan**	**4**	**4**	**16**	**Tinggi**	**Kepatuhan**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**4**	**3**	**12**	**Sedang Tinggi**	**Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan**	**Januari s/d Juni**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan**		√			√			√			√		**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
11.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	RSK MJ 32	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal	Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Kualitas hasil pekerjaan dibawah standard; 2. Inefisiensi anggaran; 3. Potensi menjadi temuan Inspektorat dan/atau BPK yang menjadi Temuan Kerugian negara	Lurah	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Pelaksanaan paket-paket pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	4	4	16	Tinggi	1. DPA; 2. SK PPKom dan PPTK; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 5. Kerangka Acuan Kerja; 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	Januari s/d Juni	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	1. Surat Instruksi Camat kepada PPKom, Lurah dan PPTK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; 2. Pakta Integritas antara Pemerintah Kelurahan dengan Penyedia Barang Jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan mutu hasil pekerjaan sesuai target dan spesifikasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. Lurah; 2. PPKom, 3. PPTK Kelurahan	Lurah
11.3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	70.000.000	RSK MJ 33	Evaluasi Kelurahan tidak optimal	Ketidaksiapan Kelurahan dalam memenuhi syarat-syarat penilaian Evaluasi Kelurahan	Internal	Control	Tidak tercapainya Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	Kasi PMD dan Lurah	Evaluasi Kelurahan tidak optimal disebabkan oleh Ketidaksiapan Kelurahan dalam memenuhi syarat-syarat penilaian Evaluasi Kelurahan	4	4	16	Tinggi	1. SK Pelaksana Kegiatan; 2. Juknis dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 3. DPA; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk segera melakukan penginputan Prodeskel dan Efdeskel, serta mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	Januari s/d Juni	Kasi PMD dan Lurah	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk segera melakukan penginputan Prodeskel dan Efdeskel, serta mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	Kasi PMD dan Lurah	CAMAT
12	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**454 Lembaga**	**18.306.568.000**	**RK MJ 12**	**Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tidak tepat waktu**	**Kurangnya Koordinasi dengan pimpinan di wilayah kecamata**	**Eksternal**	**UC**	**Konflik di masyarakat**	**Sekretaris Camat**	**Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tidak tepat waktu disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi dengan pimpinan di wilayah kecamata**	**4**	**4**	**16**	**Tinggi**	**Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan**	**Tidak Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**4**	**3**	**12**	**Sedang Tinggi**	**Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
12.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	454 Lembaga	17.978.920.000	RSK MJ 34	Tidak berfungsinya lembaga secara optimal sebagai mitra pemerintah	Kurangnya komunikasi dan integrasi antara lembaga kemasyarakatan dan perangkat daerah.	Eksternal	Control	Lembaga tidak mampu menjadi agen penggerak perubahan sosial di tingkat komunitas.	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	Tidak berfungsinya lembaga secara optimal sebagai mitra pemerintah disebabkan oleh Kurangnya komunikasi dan integrasi antara lembaga kemasyarakatan dan perangkat daerah.	4	4	16	Tinggi	1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 2. DPA; 3. Perbup Nomor…..tentang Program RT-ku Terbaik; 4. Juknis pelaksanaan Program RT-ku Terbaik; 5. Permendagri nomor 36 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan PP nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga; 6. Permendagri No. 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu	Tidak Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	1. Koordinasi dan monitoring berkala atas pelaksaaan kegiatan	Januari s/d Desember	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	1. Koordinasi dan monitoring berkala atas pelaksaaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	CAMAT
12.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	154 Lembaga	97.648.000	RSK MJ 35	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan tidak terlaksana tepat waktu	Dasar hukum pelaksanaan Program RT-ku terbaik terlambat diterbitkan	Eksternal	Control	Keterlambatan sosialisasi dan pelaksanaan Program RT-ku Terbaik	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan tidak terlaksana tepat waktu disebabkan oleh Dasar hukum pelaksanaan Program RT-ku terbaik terlambat diterbitkan	4	4	16	Tinggi	1. Perbup Nomor…..tentang Program RT-ku Terbaik; 2. Juknis pelaksanaan Program RT-ku Terbaik; 3. SK Tim Pelaksana Pendampingan Program RT-ku terbaik; 4. DPA	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Program RT-ku Terbaik	Januari s/d Desember	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Program RT-ku Terbaik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, Lurah	CAMAT

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

													ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN																PEMANTAUAN RTP														
12.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	240 Unit	230.000.000	RSK MJ 36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat;	Internal	Control	Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan terhambat	Kasi PMD	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat;	4	4	16	Tinggi	1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 2. DPA; 3. SK PPKom dan PPTK; 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dari APBD; 6. Kerangka Acuan Kerja; 7. Proposal dari lembaga kemasyarakatan.	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa; 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan	Januari s/d Desember	Kasi PMD	1. Instruksi Camat kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa; 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD	CAMAT
13	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**4 Laporan**	**95.000.000**	**RK MJ 13**	**Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak optimal**	**Kurangnya koordinasi lintas sektoral dan masing-masing instansi menjalankan tugas secara terpisah**	**Eksternal dan Intrnal**	**C**	**Rawan muncul gangguan Ketentraman dan ketertiban umum**	**Sekretaris Camat**	**Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak optimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral dan masing-masing instansi menjalankan tugas secara terpisah**	**3**	**4**	**12**	**Sedang Tinggi**	**1. Permendagri No. 26 Tahun 2020 adalah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 4. DPA**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**3**	**3**	**9**	**Sedang Tinggi**	**Koordinasi lintas sektoral dan pembentukan tim kerja bersama**	**Januari-Desember**	**Sekretaris Camat**	**Koordinasi lintas sektoral dan pembentukan tim kerja bersama**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
13.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	95.000.000	RSK MJ 37	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak optimal	Tokoh hanya dilibatkan secara simbolis, bukan sebagai bagian dari proses deliberatif.	External	C	Hubungan dengan Tomag dan Tomas kurang harmonis	Kasi Trantib	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak optimal disebabkan oleh Tokoh hanya dilibatkan secara simbolis, bukan sebagai bagian dari proses deliberatif.	3	4	12	Sedang Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	Januari-Desember	Kasi Trantib	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT
14	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**2 Kegiatan**	**7.245.000.000**	**RK MJ 14**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tidak optimal**	**Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang**	**Eksternal dan Internal**	**UC/C**	**Menurunnya kinerja pemerintah Kecamatan**	**Camat**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tidak optimal disebabkan oleh Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang**	**4**	**5**	**20**	**Sangat Tinggi**	**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)**	**Memadai**	**Efektif**	**Ada**	**Mitigasi**	**4**	**4**	**16**	Tinggi	**Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan**	**Januari s/d Desember**	**Sekretaris Camat**	**Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	**Sekretaris Camat**	**CAMAT**
14.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN MUARA JAWA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 orang	7.100.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Kecamatan Muara Jawa tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan LPTQ Kabupaten; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan serta penilaian buruk kepada Pemerintah Kecamatan Muara Jawa sebagai tuan rumah	Suryani,S.IP	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Kecamatan Muara Jawa tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan LPTQ Kabupaten; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 4. SK Ketua LPTQ Kabupaten bahwa Kecamatan Muara Jawa sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupten Tahun 2025; 5. DPA; 6. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	Suryani,S.IP	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Suryani,S.IP	CAMAT
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Kecamatan Muara Jawa
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Renstra : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan
Sasaran Strategis Renstra : Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
: Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN TAMA POLE)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	10.000.000	RSK MJ 38	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	Eksternal dan Internal	UC/C	Ketidakpuasan peserta kegiatan	Lurah	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2026 di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak optimal disebabkan oleh 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan; 2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan LPTQ Kecamatan; 3. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena Keterbatasan anggaran	4	5	20	Sangat Tinggi	1. UUD 1945 pasal 28 dan 29; 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006) tentang Kerukunan Umat Beragama; 3. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	4	4	16	Tinggi	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d September	PPTK Kelurahan	1. Koordinasi dengan LPTQ Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja panitia pelaksanaan MTQ masing-masing Kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kelurahan	Lurah

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : **Kutai Kartanegara**
Nama SKPD : **Kecamatan Muara Jawa**
Tahun Penilaian : **2026**
Tujuan Renstra : **Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan**
Sasaran Strategis Renstra : **Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan**
Indikator Kinerja Utama : **Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP**
: **Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan**

													ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN															**PEMANTAUAN RTP**												
14.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	65.000.000	RSK MJ 39	Konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang menghambat pengambilan keputusan.	Perbedaan prioritas dan kepentingan antar instansi yang terlibat.	Eksternal	C	Tertundanya pelaksanaan kegiatan dan Laporan	Kasi Trantib	Konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang menghambat pengambilan keputusan, disebabkan oleh Perbedaan prioritas dan kepentingan antar instansi yang terlibat.	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; 2. DPA; 4. Kerangka Acuan Kerja	Memadai	Efektif	Ada	Mitigasi	3	3	9	Sedang Tinggi	1. Instruksi Camat kepada Kasi Trantib untuk proaktif berkoordinasi dengan unsur Muspika; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Januari s/d Desember	Kasi Trantib	1. Instruksi Camat kepada Kasi Trantib untuk proaktif berkoordinasi dengan unsur Muspika; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantib	CAMAT

MUARA JAWA, 9 MARET 2026
CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MUARA JAWA

MUHAMMAD RAMLI,SE,MM
PEMBINA, IV/a
NIP. 197506042000121003